



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 573 /B.07/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

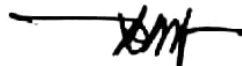
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.**
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.**
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/437/B.09/HK/2018, tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 12 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

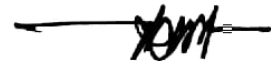
LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 93 /B.07/HK/2020
 TANGGAL: 6-10-2020

**REKAPITULASI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/	HASIL ABK	KELEBIHAN / KURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	1	1,365	1	0	A		
2	- SEKRETARIS DINAS	1	1,304	1	0	A	1,9334	A
3	- KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGAWALAN	1	1,044	1	0	A		
4	- Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1,682	2	1	A		
5	- Pengelola Kepegawaian	1	1,664	2	1	A		
6	- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	0	1,712	2	2	A		
7	- Sekretaris	0	0,702	1	1	C		
8	- Pengadministrasi Umum	5	3,136	3	2	A		
9	- Pengemudi	0	2,000	2	2	A		
10	- Petugas Keamanan	1	4,440	4	3	A		
11	- KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET	1	1,077	1	0	A		
12	- Analis Keuangan	1	3,060	3	2	A		
13	- Verifikator Keuangan	0	2,794	3	3	A		
14	- Analis Laporan Keuangan	1	1,716	2	1	A		
15	- Pengelola Keuangan	0	2,632	3	3	A		
16	- Pengadministrasi Keuangan	3	2,532	3	0	A		
17	- Bendahara	1	0,946	1	0	B		
18	- KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	1	1,048	1	0	A		
19	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	1,640	2	2	A		
20	- Analis Rencana Program dan Kegiatan	1	1,680	2	1	A		
21	- Pengelola Bahan Perencanaan	2	1,860	2	0	A		
22	- KEPALA BIDANG PERUMAHAN	1	1,444	1	0	A	1,6968	A
23	- KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIK PERUMAHAN	1	1,481	1	0	A		
24	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1,716	2	1	A		
25	- Analis Bangunan dan Perumahan	1	1,992	2	1	A		
26	- Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	0	1,176	1	1	A		
27	- KEPALA SEKSI PENYEDIAAN PERUMAHAN	1	1,240	1	0	A		
28	- Analis Perumahan	1	1,730	2	1	A		
29	- Pengelola Perumahan dan Permukiman	1	1,536	2	1	A		
30	- Juru Survei Permukiman Perumahan	3	2,540	3	0	A		
31	- KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN PERUMAHAN	1	1,204	1	0	A		
32	- Analis Strategi Pembiayaan	0	1,944	2	2	A		
33	- Analis Perumahan	1	2,336	2	1	A		
34	- Pengelola Perumahan dan Permukiman	2	1,720	2	0	A		
35	- KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	1	1,223	1	0	A	1,4234	A
36	- KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIK KAWASAN PERMUKIMAN	1	1,069	1	0	A		
37	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1,934	2	1	A		
38	- Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	0	0,788	1	1	C		
39	- Pengelola Pengawasan	1	1,312	1	0	A		
40	- KEPALA SEKSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1	1,423	1	0	A		
41	- Analis Pengelolaan Sumber Daya Air	0	1,512	2	2	A		
42	- Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	0	1,174	1	1	A		
43	- Pengawas Fisik Permukiman	0	1,403	1	1	A		
44	- KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1,360	1	0	A		
45	- Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana	2	2,155	2	0	A		
46	- Pengawas Fisik Permukiman	2	1,540	2	0	A		
47	- Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	1	1,610	2	1	A		
48	- KEPALA BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	1	1,206	1	0	A	1,4962	A
49	- KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIK BANGUNAN GEDUNG DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	1	1,186	1	0	A		
50	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	2,182	2	1	A		
51	- Penelaah Mutu Konstruksi	1	2,104	2	1	A		
52	- Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	1	1,544	2	1	A		
53	- KEPALA SEKSI BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	1	1,090	1	0	A		
54	- Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	2	1,552	2	0	A		
55	- Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman	2	1,632	2	0	A		
56	- Pengelola Bangunan Gedung	0	0,732	1	1	C		
57	- KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR WILAYAH	1	1,331	1	0	A		
58	- Analis Pengelolaan Sumber Daya Air	0	2,100	2	2	A		
59	- Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	1	1,216	1	0	A		
60	- Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana	1	1,575	2	1	A		
61	- KEPALA BIDANG PEMANFAATAN RUANG DAN PERTANAHAN	1	1,331	1	0	A	1,9101	A
62	- KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG	1	1,398	1	0	A		
63	- Analis Pemanfaatan Ruang	0	1,528	2	2	A		
64	- Penyusun Rencana Tata Ruang	0	1,848	2	2	A		
65	- Pengelola Tata Ruang	0	0,792	1	1	C		
66	- KEPALA SEKSI PERMUKIMAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG	1	1,248	1	0	A		
67	- Analis Penertuban Pemanfaatan Ruang	1	2,432	2	1	A		
68	- Pengawas Tata Ruang	0	1,056	1	1	A		
69	- Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0	0,900	1	1	B		
70	- KEPALA SEKSI PENATAUSAHAAN PERTANAHAN	1	1,206	1	0	A		
71	- Analis Pertanahan	0	2,088	2	2	A		
72	- Analis Hukum Pertanahan	0	0,876	1	1	C		
73	- Pengadministrasi Pertanahan	1	1,560	2	1	A		
74	- JP Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	0	0,804	1	1	C		
75	- JP Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	0	0,984	1	1	B		
76	- JP Teknik Penyehatan Lingkungan Madya	0	1,188	1	1	A		

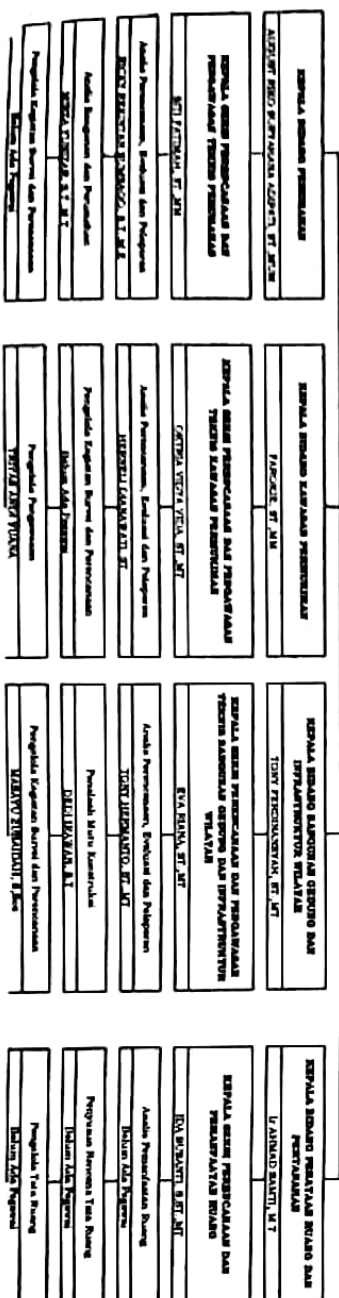
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BERAN KERAJA/	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	- JF Teknik Persekitaran Lingkungan Utama	0	1,392	1	1	A		
78	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	0	0,904	1	1	B		
79	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	0	0,812	1	1	C		
80	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya	0	1,308	1	1	A		
81	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama	0	0,528	1	1	D		
82	- JF Penata Ruang Pertama	0	0,508	1	1	D		
83	- JF Penata Ruang Muda	0	0,536	1	1	D		
84	- JF Penata Ruang Madya	0	0,924	1	1	B		
85	- JF Penata Sumber Daya Manusia Aparatur Pelaksana/Terampil	0	0,540	1	1	D		
86	- JF Penata Sumber Daya Manusia Aparatur Pelaksana	0	0,668	1	1	D		
87	- JF Penata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	0	0,860	1	1	C		
88	- JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	0	1,437	1	1	A		
89	- JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	0	0,916	1	1	B		
90	- JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	0	0,964	1	1	B		
91	- JF Analis Kebijakan Pertama	0	1,092	1	1	A		
92	- JF Analis Kebijakan Muda	0	0,904	1	1	B		
93	- JF Analis Kebijakan Madya	0	1,296	1	1	A		
94	- JF Analis Kebijakan Utama	0	1,428	1	1	A		
95	- JF Penata Laksana Barang Pelaksana/Terampil	0	0,660	1	1	D		
96	- JF Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	0,957	1	1	B		
97	- JF Penata Laksana Barang Penyelia	0	0,580	1	1	D		
98	- JF Perencana Pertama	0	0,770	1	1	C		
99	- JF Perencana Muda	0	1,402	1	1	A		
100	- JF Perencana Madya	0	1,284	1	1	A		
101	- JF Perencana Utama	0	1,160	1	1	A		
	Jumlah	66	145,118	148	82		1,6000	A

GUBERNUR LAMPUNG,



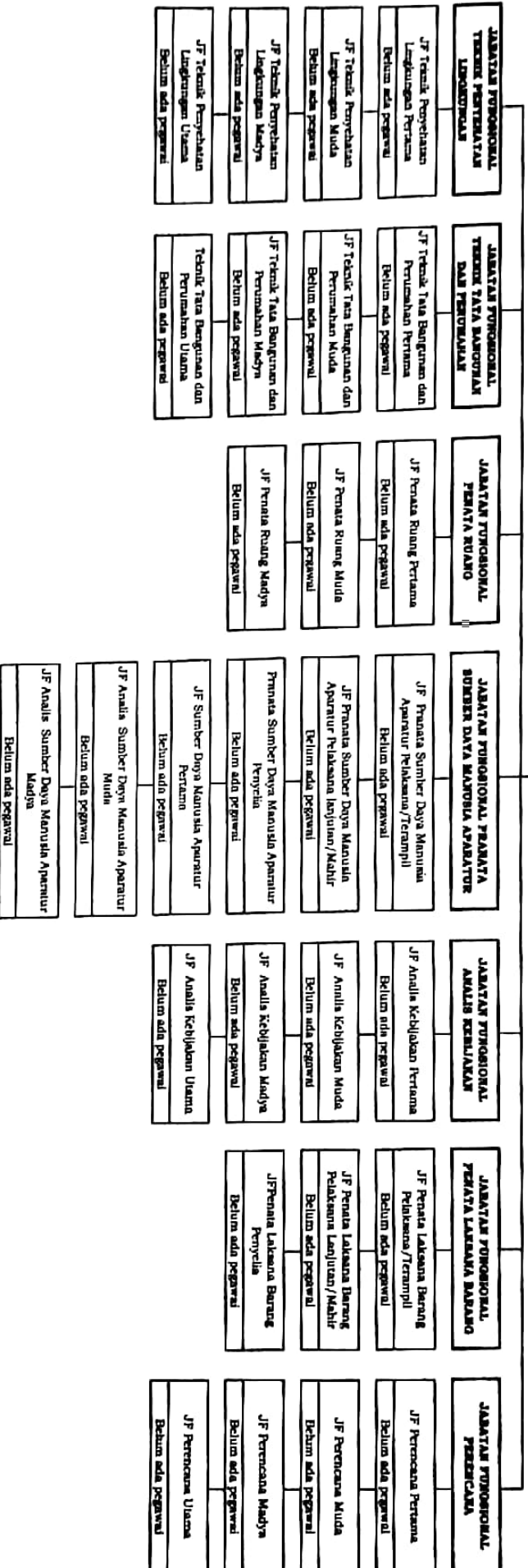
ARINAL DJUNAIDI

KORALA DISEA PEMERINTAH, KAWASAN PEMERINTAH DAN CIPTA KARYA THOMAS EDWIGE ALI HUTAALAYATNO, ST., PH., PHU Pembina Tk. I NIP. 19700704 199703 1 003		SEKRETARIAS Ir. HENDU WARTOJI, M.T	
KORALA GOS BAKULS UTUNG DAN KEPERAWATAN ALIA SYIRAZI, S.TP, M.A. Ambil Perencanaan Bakuas Dupa Makuas Ageratue NOEL ASHRIAR, S.IP Pengada Perencanaan ROHMALAH, A.Md Pengada Bakuas dan Pamarua Kertor Dahya Aila Pngemas		KORALA GOS BAKULS KEMULASAN DAN AMT DR. JUSCO BAHUWANTORO, M.A. Ambil Kewangan RETI LATIPUL, S.N. Verbasan Kewangan Dahya Aila Pngemas Ambil Laporan Kewangan MUYAHIZ	
KORALA GOS BAKULS PERENCANAAN ROSE SENGALA HIRAWANTI, S.T., M.A. Ambil Perencanaan, Bakuas dan Pelagaran Bahya Aila Pngemas Ambil Bakuas Pngemas dan Pelagaran NOEL LUBAULATRI, S.T Pengada Bakuas Perencanaan EGALINDA, A.Md TOOL PERENCANAAN A.Md			



2.2 PETA JABATAN FUNGSIONAL BASU, PERTUBUHAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DINAS PERORANGAN, KAWASAN PERORANGAN DAN CIPTA KARYA

KOPALA DINAS
PERORANGAN, KAWASAN PERORANGAN DAN CIPTA
KARYA
THOMAS EDWIN ALI HUTAGALUNG, ET., B.S., MM
Pembinas Tk. I
NIP. 19700704 199703 1 003



GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

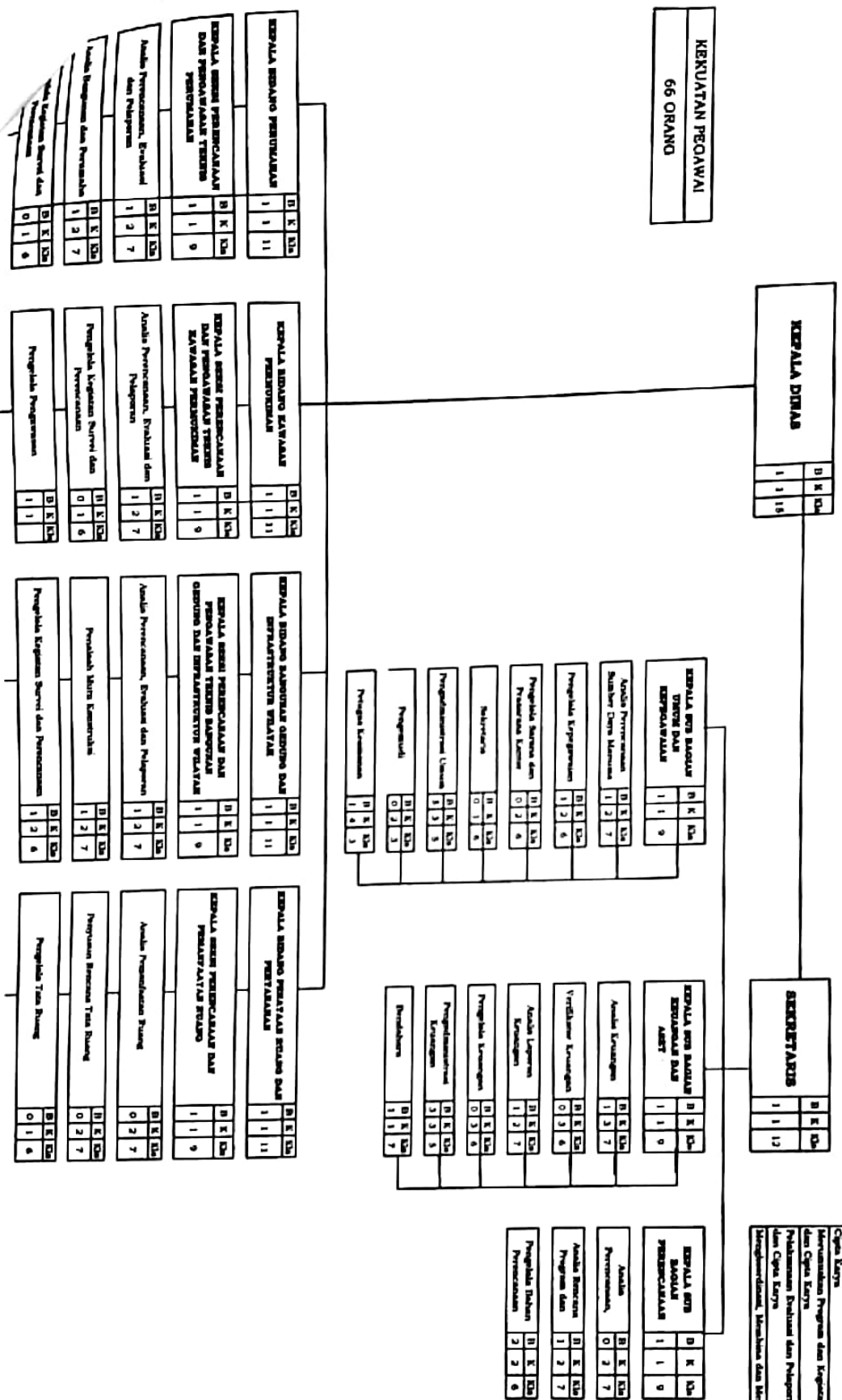
BEAN KERJA

Menyediakan Berencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya

Menyediakan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya

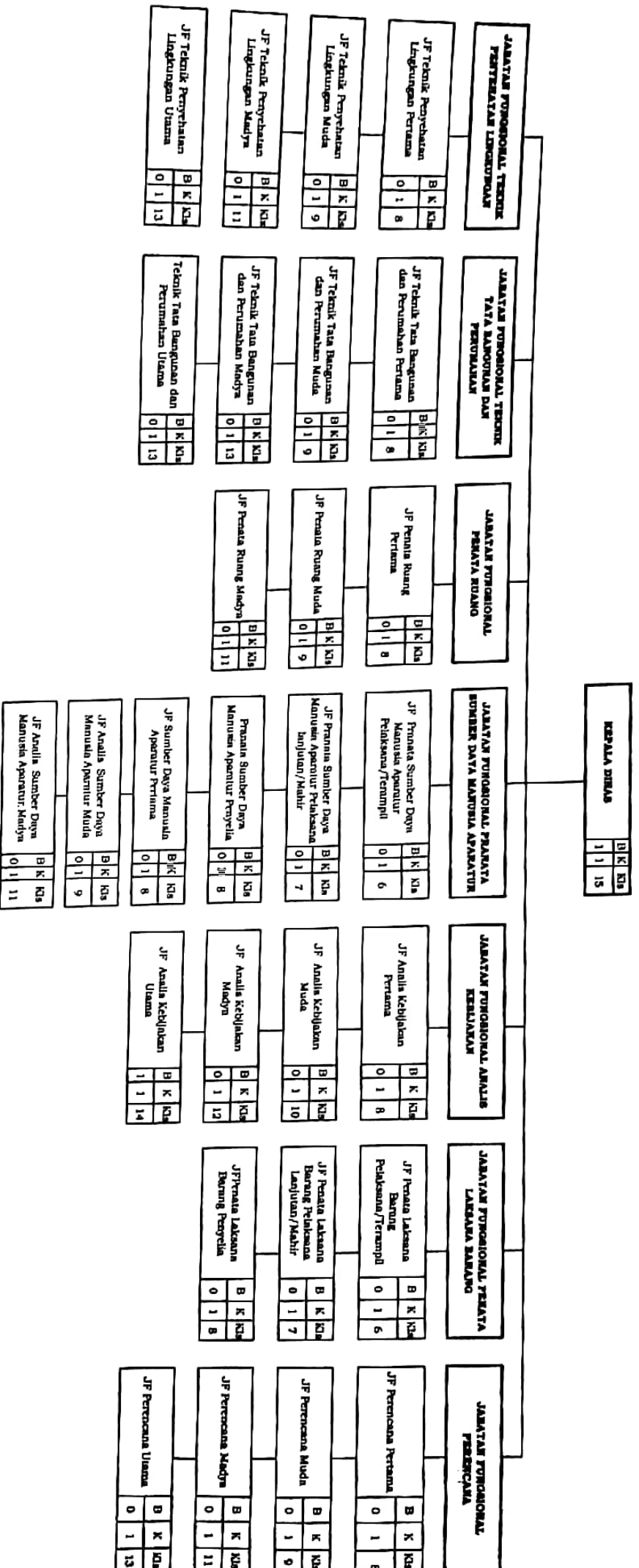
Menyediakan Fasilitas dan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya

Menyediakan, Membangun dan Memperbaiki Fasilitas Publikasi dan Komunikasi



KEPALA DESK PERTANAHAN PERTANAHAN	B	K	Da
	1	1	9
Analisis Perumahan	B	K	Da
	1	2	7
Pengelola Perumahan dan Perumahan	B	K	Da
	1	2	6
Jasa Sewa Perumahan	B	K	Da
	3	3	5
KEPALA DESK PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	B	K	Da
	0	2	9
Analisis Strategi Pembangunan	B	K	Da
	0	2	7
Analisis Perumahan	B	K	Da
	1	2	7
Pengelola Perumahan dan Perumahan	B	K	Da
	2	2	6
KEPALA DESK AIR KOTOR DAN PERTANAHAN LINGKUNGAN PERTANAHAN	B	K	Da
	1	1	9
Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	B	K	Da
	0	2	7
Pusat Pengelolaan Lingkungan	B	K	Da
	0	1	7
Pengawasan Perek Perumahan	B	K	Da
	0	1	7
KEPALA DESK PERSEKUTUAN KAWALAN PERSEKUTUAN	B	K	Da
	1	1	9
Analisis Pengelolaan Sana dan Pasar	B	K	Da
	2	2	7
Pengawasan Perek Perumahan	B	K	Da
	2	2	7
Pusat Pengelolaan Lingkungan	B	K	Da
	1	2	7
KEPALA DESK BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	B	K	Da
	1	1	9
Analisis Bangunan Gedung dan Perumahan	B	K	Da
	2	2	7
Pengelola Bangunan Gedung dan Perumahan	B	K	Da
	2	2	7
Pengelola Bangunan Gedung	B	K	Da
	0	1	6
KEPALA DESK DEKORATIF DAN WILAYAH	B	K	Da
	1	1	9
Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	B	K	Da
	0	2	7
Pusat Pelayanan Lingkungan Perumahan	B	K	Da
	1	1	7
Analisis Pengelolaan Sana dan Pasar	B	K	Da
	1	2	7
KEPALA DESK PERSEKUTUAN, PERSEKUTUAN DAN PERSEKUTUAN TATA RUANG	B	K	Da
	1	1	9
Analisis Perumahan Perumahan	B	K	Da
	1	2	7
Pengawasan Tata Ruang	B	K	Da
	0	1	7
Pengelola Perumahan Perumahan Ruang	B	K	Da
	0	1	6
KEPALA DESK PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	B	K	Da
	1	1	9
Analisis Perumahan	B	K	Da
	0	2	7
Analisis Hubung Perumahan	B	K	Da
	0	1	7
Pengelola Perumahan Perumahan	B	K	Da
	1	2	5

**3.2 PETA JABATAN FUNGSIONAL, HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMUKAN DAN CIPTA KARYA**



GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI